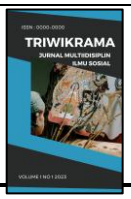
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR: ANALISIS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

Muhammad Farrel Al Rasyid[1], Kezya Audiena Nazhifah[2], Dewi Novianti Sugiarto[3], Eva Hany Fanida[4], Galih Wahyu Pradana[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi S1 Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

24040674052@mhs.unesa.ac.id,
24040674065@mhs.unesa.ac.id,
24040674077@mhs.unesa.ac.id,
evafanida@unesa.ac.id,
galihpradana@unesa.ac.id

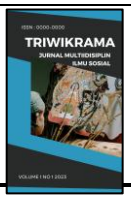
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Pengukuran kinerja menjadi salah satu alat yang penting bagi organisasi sektor publik dalam menilai hasil yang telah dicapai sekaligus mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber dayanya. Penelitian ini bertujuan memaparkan dan menganalisis bagaimana pengukuran kinerja diterapkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan merujuk pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, yang meliputi indikator, cara pengukuran, hasil pengukuran, serta implikasinya terhadap perbaikan kinerja. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, sedangkan datanya berupa data sekunder yang ditelaah melalui analisis dokumen dan dilengkapi dengan penghitungan ulang persentase capaian terhadap target. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa semua indikator pada level sasaran berhasil melampaui target, yakni nilai evaluasi SAKIP sebesar 83,02 (101,87%), Angka Partisipasi Murni sebesar 78,07% (105,81%), serta peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan sebesar 84,20% (112,27%). Sebaliknya, Indeks Pendidikan pada level tujuan baru mencapai 0,65 dari target 0,67 (97,01%). Capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, yang perubahannya berjalan lambat dan tidak sepenuhnya dapat dipengaruhi oleh program dinas dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja ini dimanfaatkan dinas sebagai bahan pembelajaran organisasi, di antaranya dengan menelusuri siswa putus sekolah dan memperkuat mutu guru. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan penerapan tata kelola kolaboratif lintas tingkat pemerintahan, penyesuaian target dengan memperhitungkan efek tunda (lag effect), serta pengintegrasian data pendidikan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Kata kunci: pengukuran kinerja; sektor publik; LKjIP; SAKIP; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ABSTRACT

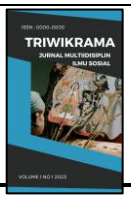
Performance measurement serves as an important tool for public sector organizations in assessing the results they have achieved and in accounting for how their resources are used. This study aims to describe and analyze how performance measurement is applied at the East Java Provincial Education Office, referring to its 2024 Government Agency Performance Report (LKjIP), which covers the indicators, measurement methods, measurement results, and their implications for performance improvement. The study adopts a descriptive qualitative approach with a case study design, using secondary data that were examined through document analysis and complemented by a recalculation of achievement percentages against targets. The results show that all indicators at the target level surpassed their targets, namely the SAKIP evaluation score of 83.02 (101.87%), the Net Enrollment Rate of 78.07% (105.81%), and the improvement of teacher and education staff quality at 84.20% (112.27%). By contrast, the Education Index at the goal level reached only 0.65 against a target of 0.67 (97.01%). This result was mainly influenced by the low Mean Years of Schooling, which changes slowly and cannot be fully influenced by the office's programs within a single budget year. The office uses this performance information as material for organizational learning, among other things by tracing students who have dropped out and strengthening teacher quality. Based on these findings, this study suggests applying collaborative governance across levels of government, adjusting targets by taking the lag effect into account, and integrating education data with district and city governments.

***Keywords**: performance measurement; public sector; LKjIP; SAKIP; East Java Provincial Education Office*

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja merupakan instrumen penting bagi organisasi sektor publik untuk menilai capaian dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya. Sejak tahun 1980-an, pengukuran dan manajemen kinerja menjadi salah satu unsur dalam reformasi *New Public Management*, dan kajiannya terus bertambah pada organisasi-organisasi publik (SITASI GARENGO & SARDI 2021). Walaupun demikian, penerapan pengukuran kinerja di sektor publik tidak lepas dari persoalan, sebab ambiguitas dalam sistem pengukurannya masih menjadi masalah yang relevan hingga kini (SITASI OPPI, 2022). Selain itu, penelitian mengenai pengukuran kinerja pada organisasi publik masih terbatas, khususnya di negara berkembang (STIASI FEBRIYANTI 2024). Di Indonesia, pengukuran kinerja sektor publik diterapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kinerja setiap instansi dievaluasi satu kali dalam setahun (SITASI

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

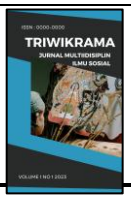


LESTARI 2022). Saat ini, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 (SITASI KEMENTERIAN PANRB, 2021)

Sebagai perangkat daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas membantu gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas ini juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (SITASI DINA PENDIDIKAN JATIM, 2025). Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dinas ini berpijak pada tiga sasaran strategis, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dinas, peningkatan akses, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah serta pendidikan khusus, dan peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan (SITASI DINAS PENDIDIKAN JATIM 2025). Hasil pengukuran pada tahun tersebut memperlihatkan capaian yang tidak seragam. Tiga indikator sasaran berhasil melampaui target, yaitu nilai evaluasi SAKIP sebesar 83,02 (target 81,5), Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 78,07% (target 73,78%), dan peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan sebesar 84,2% (target 75%). Meskipun begitu, Indeks Pendidikan pada tingkat tujuan baru mencapai 0,65 dari target 0,67, atau 97,01%, yang dikaitkan dengan rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Timur (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pada tingkat sasaran belum tentu langsung membawa perbaikan pada tingkat tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas bagaimana penerapan pengukuran kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan LKjIP Tahun 2024, yang meliputi indikator, cara pengukuran, hasil, serta analisis terhadap temuannya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan pengukuran kinerja tersebut, termasuk implikasi temuannya bagi perbaikan kinerja. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang penerapan pengukuran kinerja sektor publik pada instansi pendidikan tingkat provinsi di Indonesia, mengingat penelitian pengukuran kinerja organisasi publik di negara berkembang masih terbatas (SITASI FEBRIYANTI 2024). Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat indikator dan strategi, terutama untuk capaian Indeks Pendidikan, serta menjadi contoh penerapan pengukuran kinerja berbasis SAKIP bagi pembaca dan mahasiswa.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

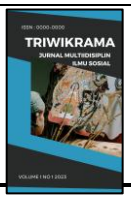


TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen kinerja. Melalui pengukuran, sebuah organisasi memperoleh informasi tentang capaiannya, lalu memakai informasi itu untuk menilai keadaan, belajar dari hasil yang ada, dan memperbaiki pekerjaan berikutnya. Garengo dan Sardi (2021) menelaah literatur mengenai pengukuran dan manajemen kinerja sektor publik dalam rentang tahun 1996 sampai 2019. Menurut mereka, sejak 1890-an topik ini sudah dipandang sebagai unsur penting dalam reformasi New Public Management (NPM). Mereka juga menyimpulkan bahwa struktur konseptual dalam literatur tersebut masih terlalu umum untuk menjawab kebutuhan organisasi publik, sehingga kajian yang lebih kontekstual tetap dibutuhkan. Behn (2003) mengingatkan bahwa pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir, ia menyebutkan delapan tujuan manajerial dari pengukuran kinerja, yaitu untuk mengevaluasi, mengendalikan, menyusun anggaran, memotivasi, mempromosikan, merayakan keberhasilan, belajar dan memperbaiki kinerja. Menurutnya, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua tujuan tersebut. Demikian, dalam penelitian ini angka capaian pada LKjIP tidak cukup dibaca sebagai persentase terhadap target saja, tetapi juga perlu dilihat untuk tujuan apa angka itu digunakan.

Di samping itu, pengukuran kinerja tidak bebas dari masalah. Oppi Campanale dan Cinquini (2022) melakukan tinjauan sistematis dan menyimpulkan bahwa ambiguitas pada sistem pengukuran kinerja sektor publik masih menjadi persoalan yang relevan. Persoalan ini bahkan sulit dihilangkan sepenuhnya, sehingga peneliti dan manajer publik perlu memahaminya dengan lebih baik. Sementara itu, Febriyanti, Widianingsih, Sumaryana, dan Buchari (2024) menyusun tipologi pengukuran kinerja organisasi publik yang didasarkan pada unit, level, ukuran (*measures*), target, dan realisasi. Mereka juga mencatat bahwa penelitian yang mendalam mengenai topik ini masih terbatas, terutama dari negara yang berkembang. Tipologi tersebut dapat digunakan untuk membaca tabel pengukuran kinerja dalam LKjIP, sebab tabel itu juga memuat indikator, target, dan realisasi pada level tujuan dan sasaran.

Di Indonesia, pengukuran kinerja sektor publik dijalankan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengatur SAKIP sebagai rangkaian kegiatan, alat, dan prosedur yang tersusun secara sistematis, mulai dari penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, sampai pelaporan kinerja. Peraturan ini sekaligus

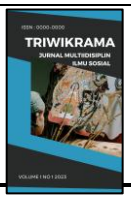


menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024). Lestari dan Salomo (2022) menjelaskan bahwa SAKIP melembagakan manajemen kinerja yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Penilaiannya dilakukan setiap tahun oleh Kementerian PANRB dengan peringkat dari AA sampai D. Hasil tinjauan mereka menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan SAKIP berada pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi, sedangkan komitmen pimpinan dan tekanan dari pihak eksternal berperan mendorong perbaikan. Dari sisi evaluasi, Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2015 sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berlaku sejak 31 Desember 2021. Penggantian itu dilakukan supaya evaluasi mampu mengakomodasi kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan perkembangan teknologi (Kementerian PANRB, 2021). Adapun penyusunan LKjIP oleh perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengacu antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2025).

Pada LKjIP 2024, kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disusun secara berjenjang. Di level tujuan terdapat Indeks Pendidikan, yang kemudian diturunkan menjadi tiga sasaran dengan indikator kinerja utama (IKU), yaitu nilai evaluasi implementasi SAKIP, Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah, dan persentase peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2025). Indeks Pendidikan dalam dokumen tersebut dihitung dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan BPS sebagai sumber datanya. Berdasarkan keterangan BPS, dimensi pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh dua indikator ini, dan RLS dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas (Sekretariat Kabinet RI, 2019). Dari definisi tersebut, penelitian ini mengajukan satu pertimbangan analitis. RLS menggambarkan akumulasi pendidikan seluruh penduduk dewasa, sehingga perubahannya cenderung lambat dan tidak sepenuhnya bisa dipengaruhi oleh program dinas dalam satu tahun anggaran. Selain itu, kewenangan dinas terbatas pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan Indeks Pendidikan mencerminkan kondisi seluruh penduduk provinsi.

Kerangka analisis dalam penelitian ini disusun dari tiga rujukan. Rujukan pertama adalah unsur pengukuran menurut Febriyanti dkk (2024), yaitu level, indikator, target, dan realisasi. Rujukan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kedua adalah tujuan penggunaan ukuran kinerja menurut Behn (2003), yang dipakai untuk menilai apakah informasi kinerja dalam LKjIP dimanfaatkan sebagai bahan belajar dan perbaikan. Rujukan ketiga adalah ambiguitas pengukuran (Oppi dkk., 2022) serta kendala SAKIP (Lestari & Salomo, 2022), yang digunakan untuk membaca penyebab capaian yang tidak seragam dan alternatif solusi yang diajukan dinas.

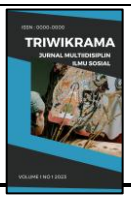
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Teknik utama yang dipakai adalah analisis dokumen, yaitu prosedur yang sistematis untuk menelaah dan menafsirkan dokumen agar diperoleh makna dan pemahaman (Bowen, 2009). Teknik ini cocok untuk studi kasus yang mengkaji satu organisasi secara mendalam. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menghitung persentase capaian terhadap target dengan perhitungan kuantitatif sederhana. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder, sumber utamanya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang disusun pada Januari 2025 dan berjumlah 247 halaman. Bagian yang dikaji terutama ringkasan Renstra dan Renja, tabel hasil pengukuran kinerja (Tabel 3.1), analisis capaian setiap indikator, serta perbandingan capaian kinerja dengan capaian anggaran. Sumber data indikator yang tercantum dalam LKjIP adalah BPS, Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP, dan Dapodik Kemdikbud. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah digunakan sebagai data pendukung. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

Analisis data mengikuti tahapan analisis dokumen menurut Bowen (2009), yaitu pemindaian awal (*skimming*), pembacaan mendalam (*reading*), dan interpretasi, yang memadukan analisis isi dan analisis tematik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1. **Inventarisasi Indikator**. Peneliti mencatat tujuan, sasaran, indikator kinerja, formulasi, sumber data, target, realisasi, dan persentase capaian dari tabel pengukuran kinerja dalam LKjIP.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



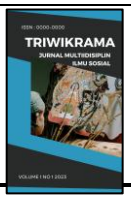
2. **Verifikasi Capaian**. Persentase capaian dihitung ulang dengan rumus capaian = (realisasi ÷ target) x 100%, kemudian dihitung hasilnya dibandingkan dengan angka yang dilaporkan dalam LKjIP.
3. **Analisis Keterkaitan Sasaran dan Tujuan**. Capaian pada level sasaran dibandingkan dengan capaian pada level tujuan, termasuk faktor penyebab yang dikemukakan dalam LKjIP.
4. **Interpretasi**. Temuan ditafsirkan memakai kerangka analisis pada tinjauan pustaka, termasuk alternatif solusi dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, pengukuran kinerja instansi ini terbagi ke dalam satu indikator tujuan dan tiga indikator sasaran. Hasil perhitungan ulang untuk verifikasi capaian menunjukkan bahwa seluruh indikator pada tingkat sasaran berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Secara rinci, indikator nilai evaluasi SAKIP tercapai sebesar 83,02 dari target 81,50 (101,87%), Angka Partisipasi Murni (APM) tercapai 78,07% dari target 73,78% (105,81%), dan persentase peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan tercapai 84,20% dari target 75,00% (112,27%). Namun, temuan pada tingkat tujuan menunjukkan hal yang kontras; capaian Indeks Pendidikan belum memenuhi target, yakni baru berada di angka 0,65 dari target 0,67 atau setara dengan 97,01%.

Ketimpangan antara keberhasilan di tingkat sasaran (output operasional) dan ketidaktercapaian di tingkat tujuan (outcome strategis) ini menarik untuk dianalisis. Merujuk pada tipologi pengukuran kinerja organisasi publik dari Febriyanti dkk. (2024), analisis ukuran (*measures*) dan level memperlihatkan adanya perbedaan karakteristik yang tajam antara kedua indikator tersebut. Ketidaktercapaian Indeks Pendidikan sangat dipengaruhi oleh rendahnya indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk di Provinsi Jawa Timur. Sebagai indikator makro, RLS mencerminkan akumulasi riwayat pendidikan seluruh penduduk dewasa yang perubahannya berjalan lambat. Hal ini menegaskan bahwa intervensi program dinas dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang cakupan kewenangannya terbatas pada pendidikan menengah dan khusus tidak bisa secara instan mengendalikan capaian pada level tujuan provinsi secara keseluruhan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Meskipun terdapat target tujuan yang belum tercapai, dokumen LKjIP memperlihatkan bahwa informasi kinerja tidak sekadar digunakan sebagai pemenuhan laporan pertanggungjawaban persentase semata. Hal ini sejalan dengan pandangan Behn (2003) di mana pengukuran kinerja harus dimanfaatkan sebagai instrumen bagi organisasi untuk belajar dan memperbaiki pekerjaan berikutnya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur secara eksplisit menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi akar persoalan dan merumuskan alternatif solusi perbaikan. Sebagai contoh nyata, untuk mengawal tren positif capaian APM agar mampu berdampak pada peningkatan Indeks Pendidikan, dinas menyiapkan intervensi strategis berupa penelusuran siswa putus sekolah melalui Gerakan Ayo Sekolah (GAS), keberlanjutan pemberian Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), serta kolaborasi penanganan Kejar Paket dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, percepatan mutu guru juga ditindaklanjuti dengan upaya pemetaan tenaga kependidikan dan penambahan kuota ujian Pendidikan Profesi Guru (PPG).

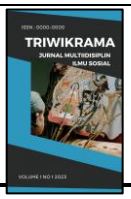
Dari dimensi tata kelola, tingginya perolehan nilai SAKIP di angka 83,02 dengan Predikat A mengindikasikan adanya perubahan budaya kinerja yang sangat akuntabel dan tingginya komitmen pimpinan pada tubuh dinas. Keberhasilan pada aspek ini mengonfirmasi argumen Lestari dan Salomo (2022) bahwa komitmen pimpinan merupakan motor pendorong utama dalam memperbaiki kualitas implementasi SAKIP. Akan tetapi, fenomena anomali berupa keberhasilan program-program taktis yang belum mampu mewujudkan tujuan akhir secara paripurna ini sekaligus membenarkan tesis Oppi dkk. (2022) mengenai ambiguitas pengukuran kinerja di sektor publik. Organisasi publik acapkali dihadapkan pada dilema di mana mereka diukur berdasarkan indikator tahunan yang rigid, padahal tanggung jawab esensial mereka bermuara pada penuntasan permasalahan sosial berdimensi jangka panjang yang kompleks.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa instansi telah menunjukkan kinerja operasional yang sangat memuaskan, dibuktikan dengan seluruh indikator sasaran (SAKIP, APM, dan mutu guru) yang melampaui target. Meskipun indikator tujuan strategis, yakni Indeks

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

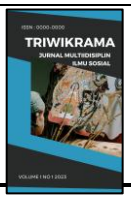


Pendidikan, belum sepenuhnya tercapai akibat lambatnya pergerakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), hal ini lebih mencerminkan kompleksitas indikator makro di sektor publik ketimbang kegagalan program. Sisi paling positif dari evaluasi ini adalah berjalannya fungsi *organizational learning* (pembelajaran organisasi). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terbukti tidak terjebak pada sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan administratif, melainkan secara kritis menggunakan data capaian tersebut untuk membedah akar masalah dan merancang intervensi kebijakan lanjutan yang berkesinambungan.

Saran

Melihat kelainan antara capaian program tahunan dan tujuan jangka panjang, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan:

1. **Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*):** Karena kewenangan pendidikan terdesentralisasi (pendidikan dasar/menengah pertama di kabupaten/kota, dan menengah atas/khusus di provinsi), Dinas Pendidikan Provinsi tidak dapat mengintervensi angka putus sekolah dan RLS secara silo. Diperlukan penguatan orkestrasi dan sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan agar program seperti Gerakan Ayo Sekolah (GAS) dan Kejar Paket memiliki daya ungkit yang masif di tingkat akar rumput.
2. **Penyesuaian Ekspektasi Target Kinerja (*Lag Effect*):** Dalam penyusunan target strategis di masa depan, pemerintah provinsi perlu secara rasional memperhitungkan *lag effect* (efek tunda) dari intervensi pendidikan. Kebijakan pendidikan hari ini tidak akan langsung membuahkan hasil dalam satu tahun anggaran. Penyesuaian ini penting agar sistem evaluasi kinerja tetap objektif dan tidak mendiskreditkan keberhasilan program operasional yang sebenarnya sudah berjalan sangat efektif.
3. **Penguatan Ekosistem Data Terintegrasi:** Keberhasilan mempertahankan Predikat A pada SAKIP perlu ditingkatkan dengan membangun ekosistem data pendidikan yang terintegrasi *real-time* dengan pemerintah daerah tingkat II, sehingga *tracking* (pelacakan) siswa rentan putus sekolah dapat dicegah sedini mungkin sebelum berdampak pada penurunan APM dan RLS di tahun berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Behn, R. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. *Public Administration Review*, 63. 586-606. 10.1111/1540-6210.00322.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9:2, 27-40.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.* Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Febriyanti, D., Widianingsih, I., Sumaryana, A., & Buchari, R. A. (2024). The Typology And Determinant Of Performance Measurement For Public Sector Organizations – A Literature Review. *Cogent Business & Management*, 11:1.

Garengo, P., & Sardi, A. (2021). Performance Measurement And Management In The Public Sector: State Of The Art And Research Opportunities. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 70:7.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, April 17). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diambil kembali dari IPM Naik Jadi 71,39, Harapan Hidup Bayi Baru Lahir di Indonesia Capai Usia 71,20 Tahun: https://setkab.go.id/ipm-naik-jadi-7139-harapan-hidup-bayi-baru-lahir-di-indonesia-capai-usia-7120-tahun/

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal MODERAT*, Vol. 8, No. 4 .

Oppi, C., & Campanale, C. (2021). Ambiguity In Public Sector Performance Measurement: A Systematic Literature Review Available To Purchase. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 34 No. 3 pp. 370–390.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014). *Era Turan Pres Iden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.